

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN BA.018  
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2023**

BPSIP Sulawesi Tenggara  
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPSIP Sulawesi Tenggara adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPSIP Sulawesi Tenggara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPSIP Sulawesi Tenggara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kota Kendari, 31 Desember 2023

Kepala Balai,



**Dr. Abdul Wahab, SP.,MP**

**NIP. 197001222007011001**

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Tanah

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.2. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Tanah Belum Diregister

C.2.3. Peralatan dan Mesin

C.2.4. Gedung dan Bangunan

C.2.5. Gedung dan Bangunan Belum Diregister

C.2.6. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.7. Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

C.2.8. Aset Tetap Lainnya

C.2.9. Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.10. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.4. Aset Lainnya

C.4.1. Aset Tak Berwujud

C.4.2. Aset Lain-lain

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

C.6. Ekuitas

C.6.1. Ekuitas

- D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
  - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
  - D.2. Beban Pegawai
  - D.3. Beban Persediaan
  - D.4. Beban Barang dan Jasa
  - D.5. Beban Pemeliharaan
  - D.6. Beban Perjalanan Dinas
  - D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
  - D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi
  - D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
  - D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - E.1. Ekuitas Awal
  - E.2. Surplus/Defisit-LO
  - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
    - E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
  - E.4. Transaksi Antar Entitas
    - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
  - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
  - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
  - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
  - F.2. Pengungkapan Lain-lain



## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPSIP Sulawesi Tenggara yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kota Kendari, 31 Desember 2023

Kepala Balai,



**Dr. Abdul Wahab, SP.,MP**  
**NIP. 197001222007011001**

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 39,110,440,00 atau mencapai 46% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 84.300.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp 9,947,962,620,00 atau mencapai 97% dari alokasi anggaran sebesar Rp 10,220,829,000,00

### II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 135,237,947,998 yang terdiri dari: Aset Tetap (neto) sebesar Rp 135,187,627,998,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Tetap Lainnya (neto) sebesar Rp5.000.000,00., Paten (neto) :800.000; Software (neto): 8.865.000,00. Aset Tak Berwujud Lainnya (neto) 50.000.000.00

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 135,237,947,998.

### III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 32,247,400,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar 10,731,252,682,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-10,699,005,238,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp 0 dan Defisit Rp 6,683,040,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-10,692,142,198,00.

### IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp 136,021,238,016,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-10,692,142,198,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 9,908,852,180,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 135,237,947,998,00.

#### **V. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

## II. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPSIP Sulawesi Tenggara

BPSIP Sulawesi Tenggara didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai visi “Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani” (agar disesuaikan sesuai dengan kebijakan teknis yang ada di instansi masing-masing).

#### A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPSIP Sulawesi Tenggara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual yang didapatkan dari laporan SAKTI pada Modul GL dan Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara yang diperoleh dari Laporan SAKTI Modul Aset Tetap. SAKTI Modul GL dan Pelaporan dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SAKTI Modul Aset Tetap adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

#### A.3. Basis Akuntansi

BPSIP Sulawesi Tenggara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPSIP



Sulawesi Tenggara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPSIP Sulawesi Tenggara yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPSIP Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

##### **(1) Pendapatan - LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

##### **(2) Pendapatan - LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### (5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:  
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## (7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar 39,110,440,00 atau mencapai 46% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar 84.300.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	.%
<b>Akun Pendapatan</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	84.300.000	39,110,440,00	46
Pendapatan Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>84.300.000</b>	<b>Rp39,110,440</b>	<b>46</b>

Realisasi Pendapatan TA 2023 mengalami Penurunan sebesar 46%. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BPSIP Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan  
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	.%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	39,110,440,00	0,00	-
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	,00	47.100.100,00	-
Pendapatan Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>39,110,440,00</b>	<b>47.100.100,00</b>	<b>46</b>

## B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp9,947,962,620,00 atau 97% dari anggaran belanja sebesar Rp10,220,829,000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per  
31 Desember 2023

Uraian	2023			
	Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai		3,591,115,000	3,554,405,051	99
Belanja Barang		6,629,674,000	6,393,557,605	96
<b>Total Belanja Kotor</b>		<b>10,220,829,000</b>	<b>9,947,962,620</b>	<b>97</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Total Belanja</b>		<b>10,220,829,000</b>	<b>9,947,962,620</b>	<b>97</b>

Dibandingkan dengan Tahun 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami Kenaikan dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Realisasi pada TA 2022 lebih rendah karena Anggaran yang tidak terealisasi akibat dari perpindahan pegawai fungsional peneliti dari badan Litbang Kementan ke BRIN.

Perbandingan Realisasi Belanja  
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	.%
Belanja Pegawai	3,554,405,051	4,868,898,436	96
Belanja Barang	6,393,557,605	5,304,507,887	80
Belanja Modal	-	1,778,771,352	100
<b>Total Belanja</b>	<b>7,617,010,912</b>	<b>11,952,117,672</b>	<b>89</b>

### B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 3,554,405,051,00 dan Rp 4,868,898,436,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar -% dari TA 2022.

Perbandingan Belanja Pegawai

per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS & PPPK	3,331,254,589	4,691,617,609,00	
Belanja Lembur	223,151,000	177,234,000,00	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>3,554,405,589</b>	<b>4,868,851,609,00</b>	
<b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>			
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3,554,405,015,00</b>	<b>4,868,851,609,00</b>	

1. Terdapat Pengembalian Belanja Pegawai penurunan belanja pegawai disebabkan oleh adanya pegawai yang purna bakti.

### 4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 6,393,557,605,00 dan Rp 7,690,921,818,00. Realisasi belanja barang TA 2023 mengalami Penurunan dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:



1. Dengan adanya Penurunan Anggaran pada Belanja Barang di TA 2023 di banding TA yang lalu antara lain di tiadakan anggaran Kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan (Kegiatan Teknis).

#### B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1,778,771,352,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2023 mengalami Penurunan sebesar 0% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Dengan Adanya Penurunan Anggaran Belanja Modal di TA.Berjalan di banding TA sebelumnya.

Perbandingan Belanja Modal  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Tanah	0,00	184,312,500,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	499,600,000,00	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	827,895,252,00	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	266,963,600,00	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0,00</b>	<b>1,778,771,351,00</b>	
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1,778,771,351,00</b>	

#### B.5.1. BELANJA MODAL TANAH

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 mengalami Penambahan dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Tidak ada Belanja Modal tanah

Perbandingan Belanja Modal Tanah  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0,00	184,312,500,00	

<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0,00</b>	<b>184,312,500,00</b>	
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>184,312,500,00</b>	

#### B.5.2. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp Rp 0,00, dan Rp 499,600,000. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 mengalami Penurunan dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Tidak ada Realisasi Belanja modal peralatan dan mesin

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

<b>Uraian Jenis Belanja</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2023</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2022</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	499,600,000,00	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0,00</b>	<b>499,600,000,00</b>	
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>499,600,000,00</b>	

#### B.5.3. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp827,895,252,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 mengalami kenaikan dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Tidak ada belanja modal gedung dan bangunan

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

<b>Uraian Jenis Belanja</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2023</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2022</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	827,895,252,00	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0,00</b>	<b>827,895,252,00</b>	
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>827,895,252,00</b>	

#### B.5.4. BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp266,963,600,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 mengalami kenaikan dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Tidak ada belanja modal JIJ.

#### Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Desember 2023	Realisasi 30 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	266,963,600,00	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0,00</b>	<b>266,963,600,00</b>	
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>266,963,600,00</b>	

### C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

#### C.1. ASET LANCAR

##### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

#### Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023
Saldo BP Kas (tunai dan Bank)	,00
Saldo BP Uang Muka (Voucher)	,00
<b>Jumlah</b>	<b>,00</b>

##### C.1.2. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp 224.000. Persediaan merupakan jenis aset dalam

bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan  
per 30 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## C.2. ASET TETAP

### C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPSIP Sulawesi Tenggara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 111,874,290,000,00 dan Rp111,874,290,000,00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>111,874,290,000,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pengembangan Melalui KDP	0,00
<b>Saldo per 30 Desember 2023</b>	<b>111.874.290.000,00</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan tanah adalah berupa:

1. Tidak ada Mutasi tambah tanah melalui pengembangan KDP.

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BPSIP Sulawesi Tenggara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 11,246,977,145,00 dan Rp 11,246,977,145,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>11,246,977,145,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	0,00
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>11,246,977,145,00</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Tidak ada penambahan/pembelian peralatan dan mesin.

#### C.2.4. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPSIP Sulawesi Tenggara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 23,591,972,900,00 dan Rp 23,591,972,900,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>23,591,972,900,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0,00
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>23.591.972.900,00</b>

#### C.2.5. GEDUNG DAN BANGUNAN BELUM DIREGISTER

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Akun Gedung dan Bangunan Belum Diregister tersaji dalam Neraca SAIBA dikarenakan aplikasi SIMAK-BMN belum dapat mengirimkan data ke SAIBA untuk melakukan jurnal koreksi terhadap akun tersebut. Rincian Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Aset Gedung dan Bangunan Belum Diregister  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### C.2.6. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPSIP Sulawesi Tenggara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 2,281,746,700,00 dan Rp 2,281,746,700,00.

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>2,281,746,700,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0,00

<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>2.281.746.700,00</b>
-----------------------------------	-------------------------

#### C.2.6. Jalan, Irigasi dan Jaringan

#### C.2.7. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN BELUM DIREGISTER

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp0,00. Akun Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister tersaji dalam Neraca SAIBA dikarenakan aplikasi SIMAK-BMN belum dapat mengirimkan data ke SAIBA untuk melakukan jurnal koreksi terhadap akun tersebut. Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 30 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

#### Perbandingan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### C.2.8. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BPSIP Sulawesi Tenggara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 dan Rp5.000.000,00.

#### C.2.9. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki BPSIP Sulawesi Tenggara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.316.454.414,00 dan Rp1.316.454.414,00. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

#### C.2.10. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPSIP Sulawesi Tenggara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-15,128,813,161,00 dan Rp-14.345.787.143,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

## Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan
1	Tanah	111,874,290,000.	
2	Peralatan dan Mesin	11,246,977,145.	(9,491,036,691)
3	Gedung dan Bangunan	23,591,972,900.	(3,751,385,325)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,281,746,700.	(1,103,365,127)
5	Aset Tetap Lainnya	5,000,000.	
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,316,454,414.	
7	AKUMULASI PENYUSUTAN	(15,128,813,161)	(14,345,787,143.)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>135,371,185,998.</b>	

## C.4.1. ASET LAINNYA

## Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp59.665.000,00 dan Rp59.665.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Aset Tak Berwujud Lainnya	50.000.000,00
Paten	800.000,00
Software	8.865.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>59.665.000,00</b>

## C.4.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki BPSIP Sulawesi Tenggara per 30 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp34.142.000,00 dan Rp34.142.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPSIP Sulawesi Tenggara serta dalam proses penghapusan dari BMN.

## C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BPSIP Sulawesi Tenggara per 30 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-43.327.000,00 dan Rp-43.287.000,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	59.665.000,00	-8.865.000,00	50.800.000,00
2.	Aset Lain-lain	34.142.000,00	-34.142.000,00	0,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>93.807.000,00</b>	<b>-43.327.000,00</b>	<b>50.480.000,00</b>

## C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

### C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp328,240,850,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

## C.6. EKUITAS

### C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp135,237,947,998,00 dan Rp 136,021,238,016,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 39,110,440,00 dan Rp 88,229,800,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya  
per 31 Desember 2023 dan 30 Desember 2022

Uraian	Realisasi 30 Desember 2023	Realisasi 30 Desember 2022
--------	-------------------------------	-------------------------------



Uraian	Realisasi 30 Desember 2023	Realisasi 30 Desember 2022
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	39,110,440,00	88,229,800,00
<b>Jumlah</b>	<b>39,110,440,00</b>	<b>88,229,800,00</b>

#### D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 3,554,405,015,00 dan Rp 4,868,898,436,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

##### Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Pegawai	3,554,405,015,00	4,868,898,436,00	(26.998)
<b>Jumlah</b>	<b>2,968,161,663,00</b>	<b>4,222,574,114,00</b>	(26.998)

#### D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp185,117,000,00 dan Rp188,589,500,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

##### Perbandingan Beban Persediaan per 30 Desember 2023 dan 30 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban persediaan	185,117,000	188,589,500	(1.841)
<b>Jumlah</b>	<b>185,117,000</b>	<b>188,589,500</b>	(1.841)

#### D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 4,439,517,615,00 dan Rp 3,879,770,593,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa  
per 31 Desember 2023 dan 30 Desember 2022

Uraian	Realisasi 30 Desember 2023	Realisasi 30 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Barang dan Jasa	4,439,517,615	3,879,770,593	13.293
<b>Jumlah</b>	<b>4,439,517,615</b>	<b>3,879,770,593</b>	<b>13.293</b>

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 515,721,931,00 dan Rp 763,587,227,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 30 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan	515,721,931,00	763,587,227,00	(32.461)
<b>Jumlah</b>	<b>515,721,931,00</b>	<b>763,587,227,00</b>	<b>(32.461)</b>

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,297,425,059,00 dan Rp569,940,267,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 30 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan	1,297,425,059,00	569,940,267,00	127.642
<b>Jumlah</b>	<b>1,297,425,059,00</b>	<b>569,940,267,00</b>	<b>127.642</b>

#### D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 30 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Pada 31 Desember 2023 tidak terdapat Bantuan yang diserahkan ke Masyarakat sedangkan 31 Desember 2022 terdapat Kegiatan yang diserahkan ke Masyarakat.

#### D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar 783,066,018,00 dan Rp 1,723,727,954,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
--------	----------------------------	----------------------------	----------------

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Amortisasi	783,066,018	1,723,727,954	(54.571)
<b>Jumlah</b>	<b>783,066,018</b>	<b>1,723,727,954</b>	<b>(54.571)</b>

#### D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Surplus/Defisit dari kegiatan Operasional	(10,699,005,238)	(11,906,284,227)	(10.14)
<b>Jumlah</b>	<b>(10,699,005,238)</b>	<b>(11,906,284,227)</b>	<b>(10.14)</b>

### E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

#### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 136,021,238,016,00 dan Rp 133,630,926,977,00.

#### E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp (10,692,142,198) dan Rp (11,906,284,227). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

#### E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.432.647.391,00

##### E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00

dan Rp2.432.647.391,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

#### **E.4. Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 9,908,852,180 dan Rp 11,863,947,875. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

##### **E.4.1. Kenaikan dan Penurunan Ekuitas**

Kenaikan dan Penurunan Ekuitas Pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 saldo dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp (783,290,018) dan Rp 2,390,311,039.

#### **E.5. Ekuitas Akhir**

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 135,237,947,998 dan Rp 136,021,238,016.

### **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

#### **F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca**

- Tidak ada peristiwa penting

#### **F.2. Pengungkapan Lain-lain**

1. Terdapat kelebihan pembayaran tunjangan jabatan fungsional yang mengalami perubahan dari fungsional (peneliti/teknisi litkayasa/perekayasa) menjadi fungsional lainnya pada satker BPSIP Sulawesi Tenggara mulai priode september 2022 sampai dengan desember 2023 senilai Rp. 210.020.000,- untuk 8 orang pegawai antara lain :
  - Agussalim, SP.,MP senilai Rp. 45.480.000,-
  - Sarjoni, MP Senilai Rp. 22.340.000,-
  - Didik Raharjo, SP Senilai Rp. 31.500.000,-
  - Edi Tando, SP.,MP Senilai Rp. 31.500.000,-
  - Waode aljumiati, S.Pt senilai Rp. 19.800.000,-
  - Dian Rahmawati, S.si.,M.Sc senilai Rp. 19.800.000,-
  - Fanny Yuliana Irawan, M.Pt senilai Rp. 19.800.000,-
  - Sitti Rahma Karimuna, SP senilai Rp. 19.800.000,-Terkait kelebihan pembayaran tunjangan fungsional tersebut, akan disetorkan ke kas negara selama 24 bulan secara berkala.
2. Terdapat saldo sebesar 172 rupiah dari kegiatan Dukungan perbenihan komoditas kopi di Sulawesi Tenggara, dikarenakan kesalahan dari pihak bank yang terlambat menihilkan saldo di tanggal 31 Desember 2022, sehingga pada tahun berikutnya masih terbaca saldo sebesar Rp.172.